



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 444 /2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR 188.45/149/2023  
TENTANG PENETAPAN PENERIMA UPAH PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan Penerima Upah Petugas Pemutakhiran Data Administrasi Kependudukan Tahun 2023, maka perlu melakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/149/2023 tentang Penetapan Penerima Upah Petugas Pemutakhiran Data Administrasi Kependudukan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1766);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 202);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 397);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 429);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 410);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 04);
26. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
27. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 08 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 08);
28. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/149/2023 tentang Penetapan Penerima Upah Petugas Pemutakhiran Data Administrasi Kependudukan Tahun 2023 yang ditetapkan tanggal 29 Maret 2023, diubah sebagai berikut:
- Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal *03 November 2023*.

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan kepada Yth:

1. Bupati Tabalong dan Wakil Bupati Tabalong (sebagai laporan) di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Petugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/444 /2023  
TANGGAL 03 November 2023

DAFTAR PENERIMA UPAH PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN TAHUN 2023

NO	NAMA JABATAN	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN	UPAH/LEMBAR (Rp)
1	KETUA RT.01	MABU'UN	MURUNG PUDAK	5.000
2	KETUA RT.02	MABU'UN	MURUNG PUDAK	5.000
3	KETUA RT.03	MABU'UN	MURUNG PUDAK	5.000
4	KETUA RT.04	MABU'UN	MURUNG PUDAK	5.000
5	KETUA RT.05	MABU'UN	MURUNG PUDAK	5.000
6	KETUA RT.06	MABU'UN	MURUNG PUDAK	5.000
7	KETUA RT.07	MABU'UN	MURUNG PUDAK	5.000
8	KETUA RT.08	MABU'UN	MURUNG PUDAK	5.000
9	KETUA RT.09	MABU'UN	MURUNG PUDAK	5.000
10	KETUA RT.10	MABU'UN	MURUNG PUDAK	5.000
11	KETUA RT.11	MABU'UN	MURUNG PUDAK	5.000
12	KETUA RT.12	MABU'UN	MURUNG PUDAK	5.000
13	KETUA RT.13	MABU'UN	MURUNG PUDAK	5.000
14	KETUA RT.14	MABU'UN	MURUNG PUDAK	5.000
15	KETUA RT.15	MABU'UN	MURUNG PUDAK	5.000
16	KETUA RT.16	MABU'UN	MURUNG PUDAK	5.000
17	KETUA RT.17	MABU'UN	MURUNG PUDAK	5.000
18	KETUA RT.18	MABU'UN	MURUNG PUDAK	5.000
19	KETUA RT.19	MABU'UN	MURUNG PUDAK	5.000
20	KETUA RT.20	MABU'UN	MURUNG PUDAK	5.000
21	KETUA RT.21	MABU'UN	MURUNG PUDAK	5.000
22	KETUA RT.01	BELIMBING RAYA	MURUNG PUDAK	5.000
23	KETUA RT.02	BELIMBING RAYA	MURUNG PUDAK	5.000
24	KETUA RT.03	BELIMBING RAYA	MURUNG PUDAK	5.000
25	KETUA RT.04	BELIMBING RAYA	MURUNG PUDAK	5.000
26	KETUA RT.05	BELIMBING RAYA	MURUNG PUDAK	5.000
27	KETUA RT.06	BELIMBING RAYA	MURUNG PUDAK	5.000
28	KETUA RT.07	BELIMBING RAYA	MURUNG PUDAK	5.000
29	KETUA RT.08	BELIMBING RAYA	MURUNG PUDAK	5.000
30	KETUA RT.09	BELIMBING RAYA	MURUNG PUDAK	5.000
31	KETUA RT.10	BELIMBING RAYA	MURUNG PUDAK	5.000
32	KETUA RT.11	BELIMBING RAYA	MURUNG PUDAK	5.000
33	KETUA RT.12	BELIMBING RAYA	MURUNG PUDAK	5.000
34	KETUA RT.13	BELIMBING RAYA	MURUNG PUDAK	5.000
35	KETUA RT.14	BELIMBING RAYA	MURUNG PUDAK	5.000
36	KETUA RT.15	BELIMBING RAYA	MURUNG PUDAK	5.000
37	KETUA RT.16	BELIMBING RAYA	MURUNG PUDAK	5.000
38	KETUA RT.17	BELIMBING RAYA	MURUNG PUDAK	5.000
39	KETUA RT.18	BELIMBING RAYA	MURUNG PUDAK	5.000
40	KETUA RT.19	BELIMBING RAYA	MURUNG PUDAK	5.000
41	KETUA RT.20	BELIMBING RAYA	MURUNG PUDAK	5.000
42	KETUA RT.21	BELIMBING RAYA	MURUNG PUDAK	5.000
43	KETUA RT.22	BELIMBING RAYA	MURUNG PUDAK	5.000
44	KETUA RT.22	BELIMBING RAYA	MURUNG PUDAK	5.000
45	KETUA RT.23	BELIMBING RAYA	MURUNG PUDAK	5.000

NO	NAMA JABATAN	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN	UPAH/LEMBAR (Rp)
46	KETUA RT.24	BELIMBING RAYA	MURUNG PUDAK	5.000
47	KETUA RT.01	SULINGAN	MURUNG PUDAK	5.000
48	KETUA RT.02	SULINGAN	MURUNG PUDAK	5.000
49	KETUA RT.03	SULINGAN	MURUNG PUDAK	5.000
50	KETUA RT.04	SULINGAN	MURUNG PUDAK	5.000
51	KETUA RT.05	SULINGAN	MURUNG PUDAK	5.000
52	KETUA RT.06	SULINGAN	MURUNG PUDAK	5.000
53	KETUA RT.07	SULINGAN	MURUNG PUDAK	5.000
54	KETUA RT.08	SULINGAN	MURUNG PUDAK	5.000
55	KETUA RT.09	SULINGAN	MURUNG PUDAK	5.000
56	KETUA RT.10	SULINGAN	MURUNG PUDAK	5.000
57	KETUA RT.11	SULINGAN	MURUNG PUDAK	5.000
58	KETUA RT.12	SULINGAN	MURUNG PUDAK	5.000
59	KETUA RT.01	MARINDI	HARUAI	5.000
60	KETUA RT.02	MARINDI	HARUAI	5.000
61	KETUA RT.03	MARINDI	HARUAI	5.000
62	KETUA RT.04	MARINDI	HARUAI	5.000
63	KETUA RT.05	MARINDI	HARUAI	5.000
64	KETUA RT.06	MARINDI	HARUAI	5.000
65	KETUA RT.07	MARINDI	HARUAI	5.000
66	KETUA RT.08	MARINDI	HARUAI	5.000
67	KETUA RT.01	CATUR KARYA	HARUAI	5.000
68	KETUA RT.02	CATUR KARYA	HARUAI	5.000
69	KETUA RT.03	CATUR KARYA	HARUAI	5.000
70	KETUA RT.04	CATUR KARYA	HARUAI	5.000
71	KETUA RT.05	CATUR KARYA	HARUAI	5.000
72	KETUA RT.01	LOK BATU	HARUAI	5.000
73	KETUA RT.02	LOK BATU	HARUAI	5.000
74	KETUA RT.03	LOK BATU	HARUAI	5.000
75	KETUA RT.04	LOK BATU	HARUAI	5.000
76	KETUA RT.05	LOK BATU	HARUAI	5.000
77	KETUA RT.01	NAWIN	HARUAI	5.000
78	KETUA RT.02	NAWIN	HARUAI	5.000
79	KETUA RT.03	NAWIN	HARUAI	5.000
80	KETUA RT.04	NAWIN	HARUAI	5.000
81	KETUA RT.05	NAWIN	HARUAI	5.000
82	KETUA RT.06	NAWIN	HARUAI	5.000
83	KETUA RT.07	NAWIN	HARUAI	5.000
84	KETUA RT.08	NAWIN	HARUAI	5.000
85	KETUA RT.09	NAWIN	HARUAI	5.000
86	KETUA RT.10	NAWIN	HARUAI	5.000
87	KETUA RT.11	NAWIN	HARUAI	5.000
88	KETUA RT.01	MAHER PASAR	HARUAI	5.000
89	KETUA RT.02	MAHER PASAR	HARUAI	5.000
90	KETUA RT.03	MAHER PASAR	HARUAI	5.000
91	KETUA RT.04	MAHER PASAR	HARUAI	5.000
92	KETUA RT.01	WIRANG	HARUAI	5.000
93	KETUA RT.02	WIRANG	HARUAI	5.000
94	KETUA RT.03	WIRANG	HARUAI	5.000
95	KETUA RT.04	WIRANG	HARUAI	5.000
96	KETUA RT.05	WIRANG	HARUAI	5.000
97	KETUA RT.06	WIRANG	HARUAI	5.000
98	KETUA RT.07	WIRANG	HARUAI	5.000
99	KETUA RT.01	BONGKANG	HARUAI	5.000
100	KETUA RT.02	BONGKANG	HARUAI	5.000

NO	NAMA JABATAN	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN	UPAH/LEMBAR (Rp)
101	KETUA RT.03	BONGKANG	HARUAI	5.000
102	KETUA RT.04	BONGKANG	HARUAI	5.000
103	KETUA RT.05	BONGKANG	HARUAI	5.000
104	KETUA RT.06	BONGKANG	HARUAI	5.000
105	KETUA RT.07	BONGKANG	HARUAI	5.000
106	KETUA RT.01	LUMBANG	MUARA UYA	5.000
107	KETUA RT.02	LUMBANG	MUARA UYA	5.000
108	KETUA RT.03	LUMBANG	MUARA UYA	5.000
109	KETUA RT.04	LUMBANG	MUARA UYA	5.000
110	KETUA RT.05	LUMBANG	MUARA UYA	5.000
111	KETUA RT.06	LUMBANG	MUARA UYA	5.000
112	KETUA RT.07	LUMBANG	MUARA UYA	5.000
113	KETUA RT.08	LUMBANG	MUARA UYA	5.000
114	KETUA RT.09	LUMBANG	MUARA UYA	5.000
115	KETUA RT.01	MANGKUPUM	MUARA UYA	5.000
116	KETUA RT.02	MANGKUPUM	MUARA UYA	5.000
117	KETUA RT.03	MANGKUPUM	MUARA UYA	5.000
118	KETUA RT.04	MANGKUPUM	MUARA UYA	5.000
119	KETUA RT.05	MANGKUPUM	MUARA UYA	5.000
120	KETUA RT.06	MANGKUPUM	MUARA UYA	5.000
121	KETUA RT.07	MANGKUPUM	MUARA UYA	5.000
122	KETUA RT.08	MANGKUPUM	MUARA UYA	5.000
123	KETUA RT.09	MANGKUPUM	MUARA UYA	5.000
124	KETUA RT.10	MANGKUPUM	MUARA UYA	5.000
125	KETUA RT.01	KAMPUNG BARU	MUARA UYA	5.000
126	KETUA RT.02	KAMPUNG BARU	MUARA UYA	5.000
127	KETUA RT.03	KAMPUNG BARU	MUARA UYA	5.000
128	KETUA RT.04	KAMPUNG BARU	MUARA UYA	5.000
129	KETUA RT.01	PASAR BATU	MUARA UYA	5.000
130	KETUA RT.02	PASAR BATU	MUARA UYA	5.000
131	KETUA RT.03	PASAR BATU	MUARA UYA	5.000
132	KETUA RT.04	PASAR BATU	MUARA UYA	5.000
133	KETUA RT.05	PASAR BATU	MUARA UYA	5.000
134	KETUA RT.06	PASAR BATU	MUARA UYA	5.000
135	KETUA RT.07	PASAR BATU	MUARA UYA	5.000
136	KETUA RT.08	PASAR BATU	MUARA UYA	5.000
137	KETUA RT.09	PASAR BATU	MUARA UYA	5.000
138	KETUA RT.01	RIBANG	MUARA UYA	5.000
139	KETUA RT.02	RIBANG	MUARA UYA	5.000
140	KETUA RT.03	RIBANG	MUARA UYA	5.000
141	KETUA RT.04	RIBANG	MUARA UYA	5.000
142	KETUA RT.05	RIBANG	MUARA UYA	5.000
143	KETUA RT.06	RIBANG	MUARA UYA	5.000
144	KETUA RT.07	RIBANG	MUARA UYA	5.000
145	KETUA RT.08	RIBANG	MUARA UYA	5.000
146	KETUA RT.09	RIBANG	MUARA UYA	5.000
147	KETUA RT.10	RIBANG	MUARA UYA	5.000
148	KETUA RT.11	RIBANG	MUARA UYA	5.000
149	KETUA RT.12	RIBANG	MUARA UYA	5.000
150	KETUA RT.13	RIBANG	MUARA UYA	5.000
151	KETUA RT.14	RIBANG	MUARA UYA	5.000
152	KETUA RT.01	PURUI	MUARA UYA	5.000
153	KETUA RT.02	PURUI	JARO	5.000
154	KETUA RT.03	PURUI	JARO	5.000
155	KETUA RT.04	PURUI	JARO	5.000

NO	NAMA JABATAN	KELURAHAN/ DESA	KECAMATAN	UPAH/LEMBAR (Rp)
156	KETUA RT.01	LANO	JARO	5.000
157	KETUA RT.02	LANO	JARO	5.000
158	KETUA RT.03	LANO	JARO	5.000
159	KETUA RT.04	LANO	JARO	5.000
160	KETUA RT.05	LANO	JARO	5.000
161	KETUA RT.01	SOLAN	JARO	5.000
162	KETUA RT.02	SOLAN	JARO	5.000
163	KETUA RT.03	SOLAN	JARO	5.000
164	KETUA RT.04	SOLAN	JARO	5.000
165	KETUA RT.05	SOLAN	JARO	5.000
166	KETUA RT.06	SOLAN	JARO	5.000
167	KETUA RT.07	SOLAN	JARO	5.000
168	KETUA RT.08	SOLAN	JARO	5.000
169	KETUA RT.09	SOLAN	JARO	5.000
170	KETUA RT.01	PULAU	KELUA	5.000
171	KETUA RT.02	PULAU	KELUA	5.000
172	KETUA RT.03	PULAU	KELUA	5.000
173	KETUA RT.04	PULAU	KELUA	5.000
174	KETUA RT.05	PULAU	KELUA	5.000
175	KETUA RT.06	PULAU	KELUA	5.000
176	KETUA RT.07	PULAU	KELUA	5.000
177	KETUA RT.01	BINTURO	KELUA	5.000
178	KETUA RT.02	BINTURO	KELUA	5.000
179	KETUA RT.03	BINTURO	KELUA	5.000
180	KETUA RT.04	BINTURO	KELUA	5.000
181	KETUA RT.05	BINTURO	KELUA	5.000
182	KETUA RT.06	BINTURO	KELUA	5.000
183	KETUA RT.01	BAHUNGIN	KELUA	5.000
184	KETUA RT.02	BAHUNGIN	KELUA	5.000
185	KETUA RT.03	BAHUNGIN	KELUA	5.000
186	KETUA RT.04	BAHUNGIN	KELUA	5.000
187	KETUA RT.05	BAHUNGIN	KELUA	5.000
188	KETUA RT.06	BAHUNGIN	KELUA	5.000
189	KETUA RT.01	AMPUKUNG	KELUA	5.000
190	KETUA RT.02	AMPUKUNG	KELUA	5.000
191	KETUA RT.03	AMPUKUNG	KELUA	5.000
192	KETUA RT.04	AMPUKUNG	KELUA	5.000
193	KETUA RT.05	AMPUKUNG	KELUA	5.000
194	KETUA RT.06	AMPUKUNG	KELUA	5.000
195	KETUA RT.07	AMPUKUNG	KELUA	5.000
196	KETUA RT.08	AMPUKUNG	KELUA	5.000
197	KETUA RT.09	AMPUKUNG	KELUA	5.000

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI